

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan adalah suatu proses multidimensional yang melibatkan berbagai perubahan-perubahan mendasar dalam struktur sosial, tingkah laku sosial, dan institusi sosial, di samping akselerasi pertumbuhan ekonomi, pemerataan ketimpangan pendapatan, serta pemberantasan kemiskinan. Maka tujuan dari pembangunan itu sendiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara umum pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan GNP (*Gross National Product*) per kapita atau pendapatan masyarakat meningkat dalam periode waktu yang panjang (Afrizal, 2013).

Walaupun banyak mendapat tanggapan di kalangan masyarakat namun tidak dapat disangkal bahwasanya pemerataan pembangunan merupakan salah satu indikator yang lazim digunakan oleh badan-badan dunia dalam menilai keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu Negara.

Pembangunan ekonomi adalah usaha untuk menaikkan tingkat pendapatan per kapita masyarakat pelaku ekonomi dalam jangka panjang. Pembangunan ekonomi dikatakan berhasil apabila upaya apabila tingkat pertumbuhan ekonomi yang diukur dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (*Gross Domestic Product* atau

*GDP*) pada suatu tahun tertentu lebih tinggi daripada tingkat pertumbuhan penduduk.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan *output* per kapita dalam jangka panjang. Dalam penggunaan yang lebih umum, istilah pertumbuhan ekonomi digunakan untuk menyatakan perkembangan ekonomi. Suatu perekonomian baru dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang apabila pendapatan per kapita menunjukkan kecenderungan (*trend*) jangka panjang yang menaik. Ini tidak berarti bahwa pendapatan per kapita harus mengalami kenaikan terus menerus.

Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi yang diukur dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dipengaruhi oleh sejumlah faktor-faktor yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu dan lainnya. Dengan demikian, laju pertumbuhan ekonomi yang diinginkan adalah tingkat pertumbuhan PDB yang tinggi dan berkelanjutan sehingga dapat berpengaruh terhadap struktur ekonomi atau mengakibatkan terjadinya perubahan struktur ekonomi.

Perubahan struktur ekonomi atau transformasi struktur ekonomi merupakan suatu perubahan ekonomi yang berkaitan dengan realokasi kegiatan ekonomi ke dalam sektor-sektor pertanian, industri (manufaktur) dan jasa yang diperlukan secara terus menerus untuk meningkatkan pendapatan perkapita dan memodernkan perekonomian (Chenery, 1986).

Diantara negara-negara kawasan Asia Tenggara, perekonomian Filipina menjadi yang terbaik dibandingkan banyak tetangganya yang babak belur seperti Indonesia, Thailand dan Malaysia. Namun karena letak geografisnya yang dekat

dengan negara-negara tersebut, Filipina juga harus mengalami pelemahan nilai tukar peso dan merosotnya nilai saham meskipun kinerja ekonominya luar biasa. Setelah mengalami kontraksi hebat pada tahun 1998 akibat krisis, ekonomi Indonesia mulai mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2000, meskipun sebenarnya masih jauh dari harapan dalam arti perbaikan (*recovery*) ekonomi yang sesungguhnya. Organisasi Kerjasama Ekonomi Dan Pembangunan (OECD) memprediksi Indonesia akan meraih pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) tertinggi di antara enam negara utama di Asean pada periode 2012-2016 (*Philstar.com* 2/9/2013). Berikut tingkat PDB beberapa di Asean tahun 2010 sampai dengan 2013:

**Tabel 1. Outlook Pertumbuhan Domestik Bruto Asia Tenggara ( dalam %)**

Tahun	Negara					
	Indonesia	Malaysia	Filipina	Singapura	Thailand	Vietnam
2000	4.9	8.3	4.0	10.3	4.6	6.1
2001	3.3	0.4	3.4	2.0	1.8	5.8
2002	4.5	5.4	3.7	4.2	5.3	7.1
2003	4.8	5.8	4.9	4.6	7.1	7.3
2004	5.0	6.8	6.7	9.2	6.3	7.8
2005	5.7	5.0	4.8	7.4	4.6	8.4
2006	5.5	5.6	5.3	8.7	5.1	8.2
2007	6.3	6.3	6.7	8.8	5.0	8.5
2008	6.0	4.9	4.2	1.7	2.5	6.3
2009	4.6	-1.5	1.1	-1.3	-2.3	5.3
2010	6.1	7.2	7.3	14.5	7.8	6.8
2011	6.3	4.6	4.5	5.6	2.5	5.9
2012	6.2	5.6	6.8	1.3	6.5	5.2
2013*	6.4	5.8	7.2	5.8	6.9	5.3

Sumber: *International Monetary Found, World Economic. 2013*

\* Angka Perkiraan

Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa dalam 10 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat stabil di kisaran 5,5% dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 6,11%. Sejak tahun 2007 hingga 2012, tingkat pertumbuhan hampir selalu

di atas 6% dengan pengecualian tahun 2009 (4,6%) sejalan dengan krisis ekonomi global akibat kegagalan sektor kredit properti (*subprime mortgage crises*) dimana sebagian besar negara bahkan mengalami pertumbuhan minus. Trend tersebut berbeda bila dibandingkan dengan Singapura yang memiliki tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 6,55%, namun fluktuasinya sangat tinggi mulai dari 14,7% (2010) setelah mengalami kontraksi -1,3% (2009). Demikian pula halnya dengan Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam yang tidak lepas dari imbas krisis global tahun 2009, sehingga turut mengalami pertumbuhan yang minus. Pertumbuhan ekonomi Vietnam memang menunjukkan tingkat yang selalu lebih tinggi dibandingkan Indonesia dari periode 2002 hingga 2010. Meskipun demikian hal ini bisa dikatakan baik, karena Pada tahun 2008, terjadi krisis global yang berpusat di Amerika Serikat. Krisis ini memberikan dampak yang cukup besar dalam perekonomian global khususnya bagi negara-negara yang mempunyai hubungan ekonomi yang sangat erat dengan Amerika Serikat. Dalam hal ini, Indonesia juga merasakan dampaknya meskipun tidak sebesar krisis moneter pada tahun 1998. Perlambatan ekonomi dunia yang semakin dalam dan anjloknya harga komoditas global mendorong merosotnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia sehingga transformasi struktur ekonomipun terpengaruh.

Transformasi struktur ekonomi, misalnya, dapat dilihat melalui peningkatan laju pertumbuhan produksi yang cepat di sektor industri dan jasa dibandingkan dengan laju pertumbuhan di sektor pertanian, sehingga secara agregat kontribusi sektor pertanian akan relatif menjadi semakin lebih kecil dan berbanding terbalik dengan pertumbuhan industrialisasi dan jasa, sehingga perekonomian menjadi semakin modern.

Pertumbuhan ekonomi wilayah dan/atau daerah atau provinsi adalah pertumbuhan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi melalui kenaikan seluruh nilai tambah (*value added*) di wilayah tersebut. Perhitungan Pendapatan wilayah pada awalnya dibuat berdasarkan harga berlaku. Namun agar dapat melihat pertambahan dari kurun waktu ke kurun waktu berikutnya, maka harus dinyatakan dalam nilai riil, artinya dinyatakan dalam harga konstan. Biasanya Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menerbitkan laporan pendapatan regional tersedia angka dalam harga berlaku dan harga konstan. Berikut akan ditampilkan Tabel yang memperlihatkan PDB Indonesia selama 14 Tahun (2000-2013):

**Tabel 2. Pendapatan Domestik Bruto ADH Konstan di Indonesia Tahun 2000-2013 (Milyar Rupiah)**

Tahun	PDB	%Pertumbuhan
2000	1226139,9	
2001	1646322	15.58%
2002	1821833.4	9.63%
2003	2013674.6	9.53%
2004	2295826.2	12.29%
2005	2774281.1	17.25%
2006	3339216.8	16.92%
2007	3950893.2	15.48%
2008	4948688.4	20.16%
2009	5606203.4	11.73%
2010	6446851.9	13.04%
2011	7419187.1	13.11%
2012	8229439.4	9.85%
2013	9074969.2	9.41%
rata-rata		13.38%

*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2014*

Dijelaskan dalam Tabel 2 adalah bagaimana perkembangan PDB Indonesia dalam kurun waktu 2000 sampai 2013, dimana data ini menggambarkan bagaimana pertumbuhan Pendapatan Domestik Bruto Indonesia yang selalu

mengalami perubahan yang positif, walaupun terjadi fluktuasi yang tidak terlalu besar perubahannya.

Pendapatan wilayah menggambarkan balas jasa bagi faktor-faktor produksi (tanah, modal, tenaga kerja, dan teknologi) yang beroperasi di daerah tersebut, sehingga secara kasar dapat menggambarkan kemakmuran daerah tersebut.

Kemakmuran suatu wilayah selain ditentukan oleh besarnya nilai tambah yang tercipta di wilayah tersebut juga oleh besar-kecilnya *transfer payment* atau bagian dari pendapatan yang mengalir ke luar wilayah atau dana dari luar wilayah yang masuk ke dalam wilayah.

Permasalahan pokok yang ada dalam pembangunan suatu daerah terletak pada penetapan prioritas kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumber daya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan agar pelaksanaan pembangunan daerah menuju kepada pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru serta merangsang peningkatan kegiatan ekonomi.

Diterbitkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 / Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 / Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, merupakan perwujudan dari kebijakan pemerintah pusat untuk memberdayakan dan meningkatkan kemampuan masyarakat di daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah. Kedua undang-undang tersebut, memiliki makna yang sangat penting bagi daerah karena adanya pemberian urusan, sumber daya

manusia dan pembiayaan, yang selama ini merupakan tanggung jawab pemerintah pusat.

Urusan dimaksud mencakup seluruh bidang pemerintahan kecuali urusan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, agama serta moneter dan fiskal. Dalam urusan pembiayaan, daerah dapat menggali sekaligus menikmati sumber-sumber potensi ekonomi serta sumber daya alamnya tanpa adanya intervensi terlalu jauh dari pemerintah pusat. Hal tersebut akan dapat berdampak terhadap kemajuan perekonomian daerah yang pada akhirnya terciptanya peningkatan pembangunan di daerah.

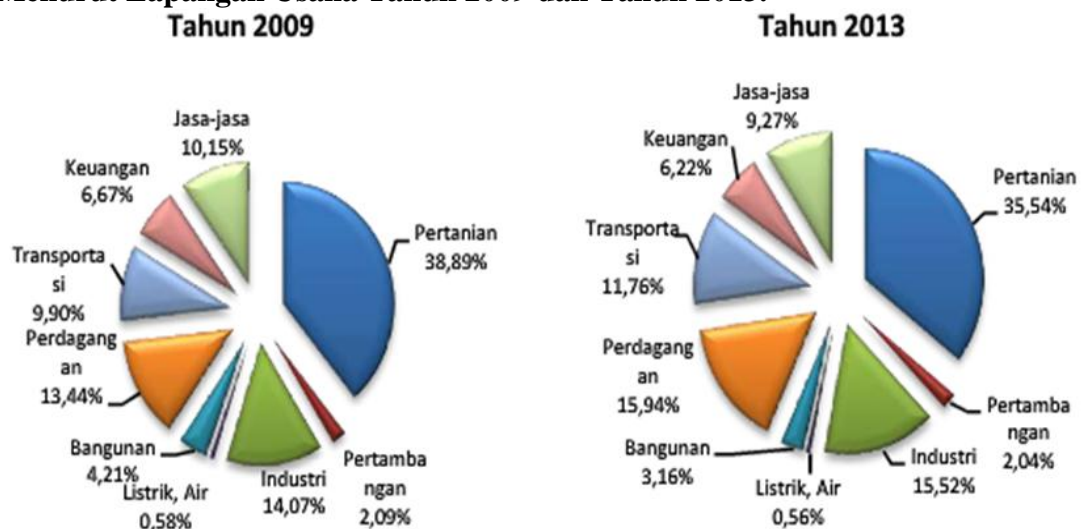
Pemerintah daerah mempunyai fungsi antara lain mengalokasikan sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat daerah. Pembangunan ekonomi daerah pada hakekatnya adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan masyarakatnya dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal. Pada dasarnya pembangunan ekonomi mempunyai empat dimensi pokok yaitu: (1) pertumbuhan, (2) penanggulangan kemiskinan, (3) perubahan atau transformasi ekonomi, dan (4) keberlanjutan pembangunan dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Transformasi struktural merupakan prasyarat dari peningkatan dan kesinambungan pertumbuhan serta penanggulangan kemiskinan, sekaligus pendukung bagi keberlanjutan pembangunan itu sendiri.

Proses pertumbuhan ekonomi yang berlangsung di suatu daerah pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya transformasi struktural, yaitu proses pergeseran pertumbuhan sektor produksi dari yang semula mengandalkan sektor primer

menuju sektor sekunder. Pergeseran pertumbuhan sektor produksi ini secara langsung juga akan berpengaruh pada perubahan komposisi tenaga kerja dari yang semula bermata pencaharian utama pada sektor pertanian, bergeser ke sektor industri, perdagangan dan jasa.

Lampung merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki prospek pertumbuhan yang cukup baik dalam kisaran 6% sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2013. Provinsi Lampung juga memiliki potensi sumber daya alam yang menjadi andalan komoditas ekspor dan sumber daya pariwisata yang mulai menarik wisatawan asing. Perekonomian Lampung masih berbasis perekonomian agraris dimana sektor pertanian masih menjadi gantungan hidup masyarakat. Struktur ekonomi Lampung berdasarkan PDRB menurut sektoral dapat dilihat dari pada Gambar 1 sebagai berikut.

**Gambar 1. Struktur Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Lampung Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009 dan Tahun 2013.**



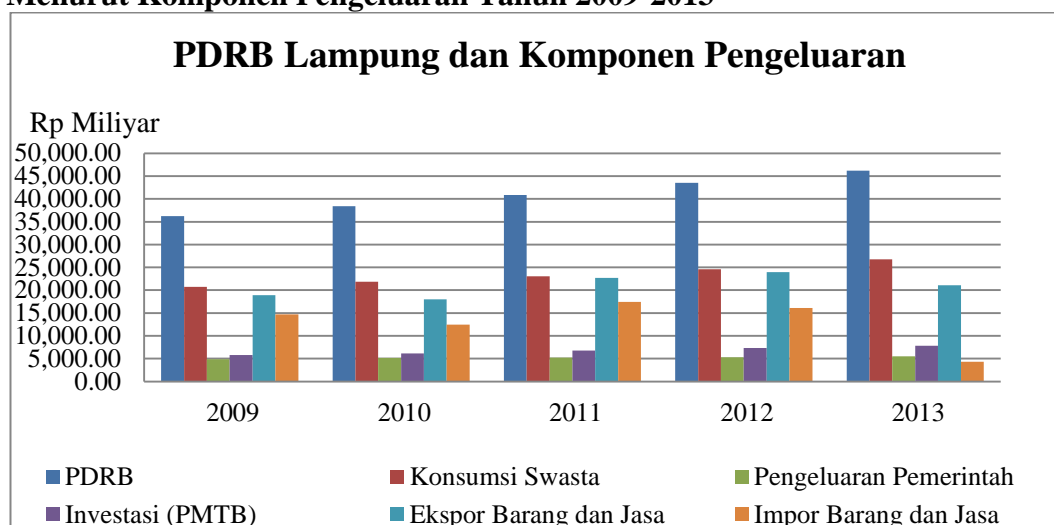
*Sumber : Susenas, Badan Pusat Statistik. 2014*



Berdasarkan Gambar 1, terlihat bahwa perekonomian Lampung masih didominasi oleh 4 (empat sektor) ekonomi yang utama, yaitu sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan/hotel/restoran dan transportasi/komunikasi. Kontribusi keempat sektor ini dalam perekonomian Lampung mencapai kisaran 75 s.d 80 persen. Sektor pertanian dalam kurun waktu lima tahun terakhir tetap memberikan kontribusi terbesar. Pada Gambar 1 dapat dilihat bahwa kontribusi sektor pertanian sedikit menurun dari 38.89% tahun 2009 menjadi 35.54% di tahun 2013. Sektor perdagangan/Hotel/Restoran sebagai kontributor terbesar kedua dengan kontribusi sebesar 13.44% di tahun 2009 meningkat menjadi 15.94% di tahun 2013. Sektor industri dan pengolahan yang menempati posisi ketiga dengan kontribusi meningkat dari 14.07% di tahun 2009 menjadi 15.52% di tahun 2013. Sektor lainnya yang juga memberikan kontribusi cukup besar adalah sektor transportasi/komunikasi. Sektor ini memberikan kontribusi sebesar 9.90 persen di tahun 2009 dan meningkat menjadi 11.76 persen di tahun 2013. Sektor kegiatan ekonomi yang memberikan kontribusi paling rendah adalah sektor listrik dan air bersih, yaitu 0.58% di tahun 2009 dan 0.56% di tahun 2013.

Ditinjau kembali PDRB Lampung berdasarkan sektor ekonomi (lapangan usaha) selama kurun waktu lima tahun yaitu dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, telah terjadi pergeseran struktur ekonomi Lampung yang ditandai dengan menurunnya kontribusi sektor ekonomi pertanian di tahun 2013. Sedangkan jika diamati PDRB Lampung dari sisi permintaan yaitu diamati dari komponen pengeluarannya terjadi perubahan yang signifikan PDRB Lampung dari komponen impor barang dan jasa di tahun 2013.

**Gambar 2. Struktur Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Lampung Menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2009-2013**



Sumber: Susenas, Badan Pusat Statistik. 2014

Berdasarkan Gambar 2, selama lima tahun terakhir PDRB Lampung dari komponen pengeluaran masih didominasi oleh komponen konsumsi dan ekspor barang dan jasa yang terus mengalami peningkatan. Komponen konsumsi menyumbang sebesar Rp 20,748.71 Miliar di tahun 2009 dan meningkat menjadi Rp 24,560.74 Miliar di tahun 2013. Untuk komponen ekspor barang dan jasa di tahun 2009 menyumbang sebesar Rp 18,944.63 Miliar menjadi Rp 21,118.40 Miliar di tahun 2013. Komponen ekspor barang dan jasa mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2012 yang mencapai sebesar Rp 23,974.26 Miliar. Sedangkan komponen impor barang dan jasa mengalami penurunan yang signifikan selama lima tahun terakhir dari Rp 14.700.48 Miliar di tahun 2009 turun menjadi Rp 4.330.62 di tahun 2013.

Penurunan komponen impor barang dan jasa di Lampung menunjukkan pergeseran komponen PDRB Lampung yang lebih memprioritaskan pertumbuhan ekonomi regional dengan menurunnya tingkat ketergantungan *supply* barang dan

jasa dari luar negeri. Dengan demikian, akan meningkatnya peran pertumbuhan ekonomi regional yang selanjutnya mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat perolehan pendapatan per kapita menunjukkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Sebaliknya penurunan pada tingkat pendapatan per kapita menunjukkan tingkat kesejahteraan yang semakin menurun. Dengan asumsi bahwa pendapatan faktor dan transfer yang mengalir keluar (*transfer out*) sama dengan transfer masuk (*transfer in*) maka pendapatan per kapita dapat ditunjukkan melalui tingkat PDRB per kapita. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang transformasi sektor ekonomi di Provinsi Lampung dengan judul penelitian sebagai berikut **“Analisis Transformasi Sektor Ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2000-2013.”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana transformasi sektor ekonomi di Provinsi Lampung dari Tahun 2000 – 2013?
2. Komponen-komponen permintaan agregat manakah yang mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung selama periode 2000-2013?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang penulis kemukakan diatas, maka dapat dijelaskan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui transformasi sektor ekonomi dengan metode *shift share* di Provinsi Lampung dari Tahun 2000 – 2013.
2. Membuktikan secara empiris pengaruh komponen-komponen permintaan agregat yaitu konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah dan net ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung selama periode 2000-2013.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

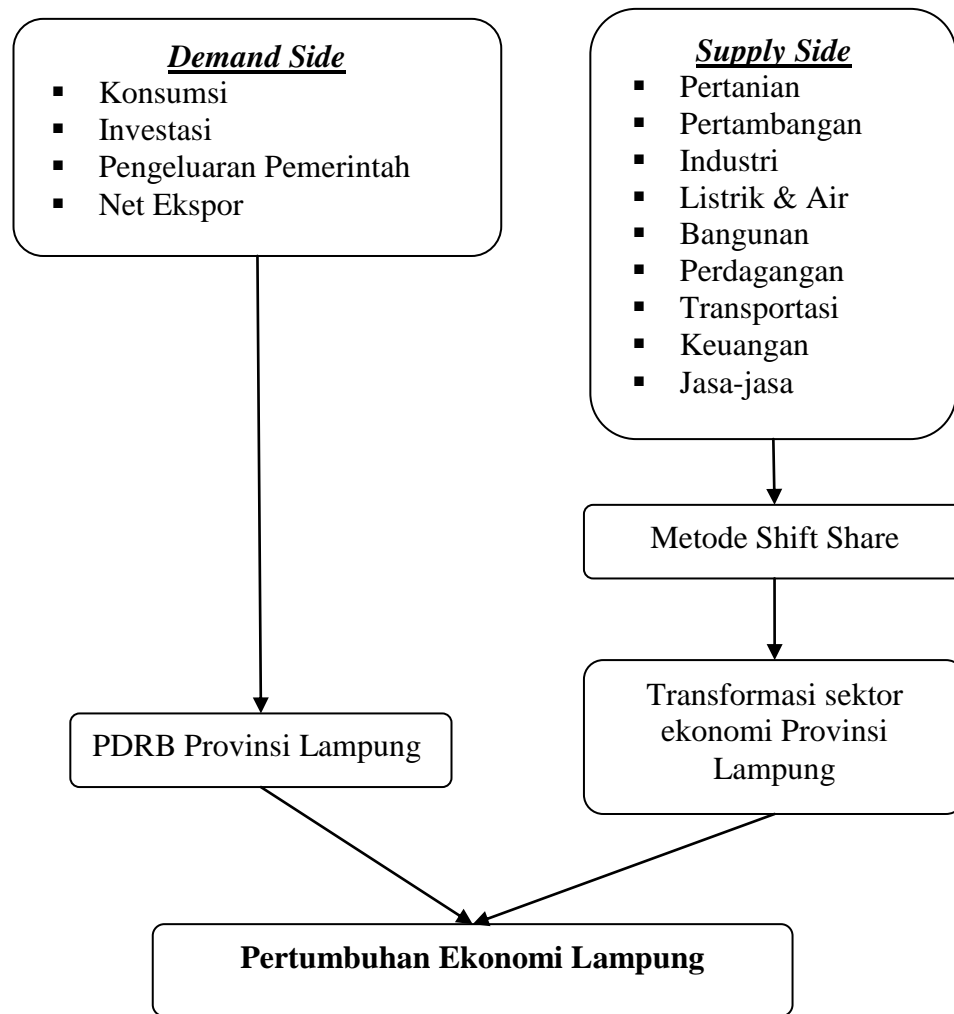
1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan bagi mereka yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai transformasi sektor ekonomi.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan serta bukti empiris mengenai pengaruh komponen-komponen permintaan agregat yaitu konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah dan net ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi.
3. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Pusat Provinsi Lampung tentang komponen-komponen permintaan agregat yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Sejalan dengan perkembangan pembangunan yang ada di suatu negara maka peran sektor pertanian semakin lama semakin kecil (baik proporsi terhadap produksi nasional maupun tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian) kemudian digeser perannya oleh sektor industri. Dalam proses pembangunan

ekonomi akan terjadi perubahan dalam struktur ekonomi suatu negara. Pada masa – masa awal pembangunan ekonomi sektor primerlah yang mendominasi perekonomian. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya sumbangan sektor pertanian terhadap produksi nasional dan banyaknya tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian.

Makin berperannya sektor industri dalam perekonomian maka menyebabkan semakin besarnya produksi nasional karena sektor industri dapat memacu pertumbuhan ekonomi lebih cepat dibandingkan sektor pertanian. Dilihat dari besarnya tingkat produksi nasional maka diharapkan akan menaikkan pendapatan masyarakat di Negara yang bersangkutan, dimana peningkatan pendapatan ini diharapkan dapat semakin mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan yang ada. Adapun kerangka pemikiran yang akan dijadikan pedoman dalam melakukan penelitian tentang transformasi sektor ekonomi Lampung periode 2000-2013, direpresentasikan melalui Gambar 3 sebagai berikut.



**Gambar 3. Kerangka Berpikir Penelitian**

## F. Hipotesis

Berdasarkan tujuan penelitian ini, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga sektor pertanian berkontribusi lebih besar terhadap PDRB Provinsi Lampung dibandingkan kontribusi sektor lainnya;
2. Diduga faktor dari sisi permintaan berpengaruh nyata dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi Lampung.

### **G. Ruang Lingkup Penelitian**

Batasan masalah dilakukan agar penelitian dan pembahasannya lebih terarah, sehingga hasilnya tidak bias dan sesuai dengan harapan peneliti. Adapun ruang lingkup penelitiannya adalah mengetahui sektor ekonomi dengan metode *shift share* di Provinsi Lampung dari Tahun 2000 – 2013, serta mengetahui secara empiris pengaruh komponen-komponen permintaan agregat terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung selama periode 2000-2013.